PARADIGMA
Jurnal Pengabdian Masyarakat
E-ISSN 2985-6442
Volume 2 | Nomor 1 | 2024

PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN CILACAP DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Alizar Isna[1]
[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman
[1]alizar.isna@unsoed.ac.id

ABSTRACT

One of the functions of the DPRD is the legislative function, which includes the preparation and stipulation of Regional Regulations (Raperda) for the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In order to increase the capacity of DPRD members in the legislative function, the Cilacap Regency DPRD held training which was packaged in the form of an Academic Study of the 2024 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) Draft Regional Regulations (Raperda). The training used 2 learning methods, namely varied lectures and hypothetical situation techniques. , one of which discusses the material "Consistency or Conformity Between Planning Documents and Between Planning Documents and Budgeting". This material is discussed from a theoretical perspective and relevant laws and regulations. At the end of the material presentation, it ended by discussing the suitability of the development focus of Permendagri No. 15 of 2023 with RKPD 2024 and KUA 2024 as well as the suitability of the development focus of Permendagri No. 15 of 2023 with RKPD 2024 and KUA 2024. The discussion process is assisted by work tables which will make it easier for training participants to discuss the theme of suitability of aspects in regional planning and budgeting.

Keywords: APBD, capacity, draft regional regulations, improvement, training.

A. PENDAHULUAN

Setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, senantiasa berupaya untuk meningkatan kualitas sumber daya manusianya. Hal tersebut disebabkan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian keunggulan dan keberhasilan organisasi, sebagaimana dijelaskan Kuruppu et.al (2021) bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada standar SDM-nya. Senada dengan Kuruppu, et.al, Karim (2019) menjelaskan kualitas SDM suatu organisasi sangat penting untuk keberhasilannya, sehingga setiap organisasi harus berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerjanya, salah satunya melalui program pelatihan dan pengembangan

Demikian halnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap. Guna meningkatkan kapasitas anggotanya, terutama berkenaan dengan

E-ISSN 2985-6442

fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Cilacap menyelenggarakan pelatihan yang dikemas dalam bentuk Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 5–7 November 2023 di Hotel Java Heritage, Jl. Dr. Angka No. 71 Purwokerto.

Guna mendukung rencana pelatihan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap mengajukan surat permohonan narasumber/fasilitator dengan nomor surat No. 172.3/1447/23. Pada surat permohonan narasumber/fasilitator tersebut, diajukan permohonan 2 narasumber/fasilitator untuk mengisi 4 sesi pelatihan, dengan materi yang relevan atau berkaitan dengan tema tentang penyusunan RAPBD. Selanjutnya, merespon surat permohonan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap No. 172.3/1447/23, melalui surat tugas (ST) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melalui ST Nomor 063/UN23.10/PM.03/2023, Dekan Fisip menugaskan kepada penulis untuk menjadi salah satu fasilitator yang akan mengisi 2 sesi pelatihan.

Sesuai dengan tema pelatihan mengenai RAPBD Kabupaten Cilacap tahun 2024, disiapkan 3 materi pelatihan. Adapun ketiga materi yang dimaksud adalah: (1) Konsistensi Atau Kesesuaian Antardokumen Perencanaan dan Antara Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran, (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Instrumen Penganggaran, dan (3) Analisis Standar Belanja (ASB) Sebagai Instrumen Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Namun karena keterbatasan artikel pengabdian masyarakat ini, maka akan dibahas materi yang pertama.

B. METODE

Sebagaimana telah diuraiakan di atas, pengembangan SDM DPRD Kabupaten Cilacap adalah pelatihan yang dikemas dalam bentuk kajian akademik. Menurut Mangkunegara (2003) pelatihan adalah suatu proses pendidikan yang diselenggarakan dalam jangka waktu yang relatif singkat menggunakan mekanisme dan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga peserta pelatihan dapat belajar tentang pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu.

Agar peserta pelatihan, dalam hal ini adalah para anggota DPRD Kabupaten Cilacap bisa memperoleh pengetahuan sesuai tujuan pelatihan, digunakanlah 2 metode pembelajaran yakni ceramah bervariasi dan teknik situasi hipotesis. Teknik

E-ISSN 2985-6442

ceramah bervariasi adalah suatu teknik penjelasan secara lisan yang dilengkapi dengan penggunaan alat bantu pandang (audio visual) dan teknik-teknik kegiatan belajar lainnya, seperti diskusi, demonstrasi, simulasi, penugasan, dan kunjungan studi. Dengan demikian, ceramah yang pada umumnya merupakan teknik untuk menjelaskan dengan satu arah dari pendidik (atau narasumber/fasilitator) kepada peserta didik (atau peserta pelatihan), akan merupakan rangsangan bagi peserta didik (peserta pelatihan) untuk melakukan kegiatan partisipatif melalui penggunaan teknik-teknik lainnya (Sudjana S., 2005). Teknik kegiatan belajar yang digunakan untuk melengkapi teknik ceramah pada kegiatan pelatihan adalah teknik diskusi. Sedangkan alat bantu pandang yang akan digunakan adalah LCD. Sedangkan teknik situasi hipotesis merupakan suatu bentuk kegiatan pembelajaran pemecahan masalah. Teknik ini merupakan suatu deskripsi singkat tentang suatu situasi/kejadian yang bercorak andaian. Teknik ini digunakan dalam mendorong para mahasiswa (atau peserta pelatihan) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai alternatif yang dapat diputuskan oleh mahasiswa atau peserta pelatihan (Sudjana S., 2005).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai kegiatan resmi DPRD Kabupaten Cilacap. pelatihan yang dikemas dalam bentuk Kajian Akademik Raperda APBD tahun 2024 diikuti seluruh anggota DPRD yang berjumlah 46 orang. Kegiatan pelatihan pada tanggal 5 November 2023 puku. 19.00 WIB dibuka secara resmi oleh Purwati, S.Pd, salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap (gambar 1).

E-ISSN 2985-6442

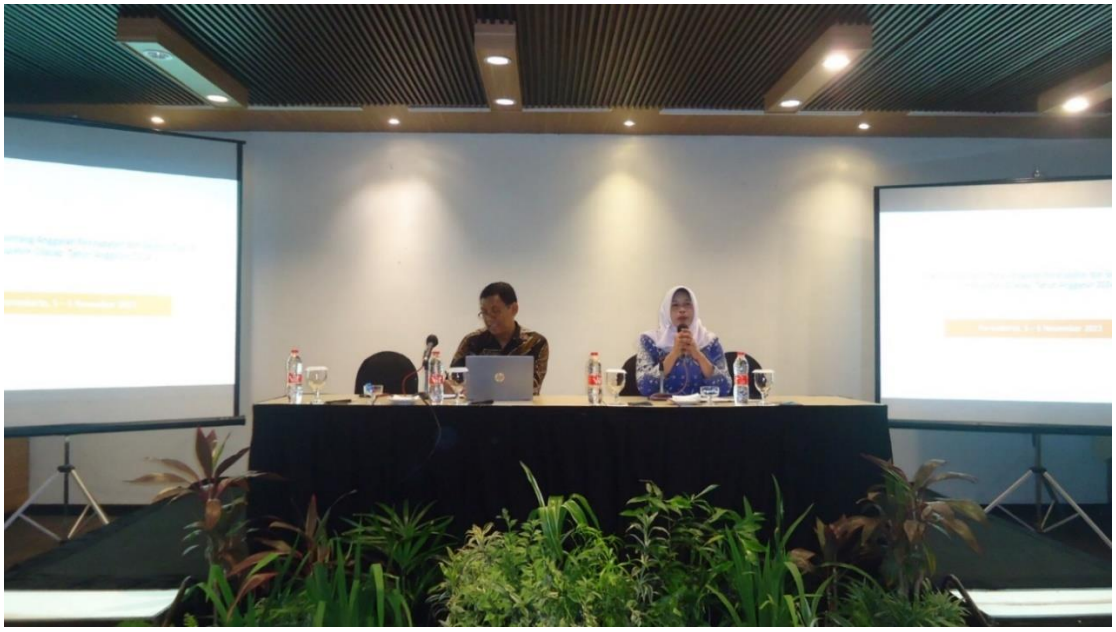

Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pelatihan

Setelah kegiatan pelatihan dibuka secara resmi, sesuai dengan jadwal kegiatan pelatihan yang telah disusun oleh sekretariat DPRD, kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi materi pertama.

Konsistensi Atau Kesesuaian Antardokumen Perencanaan dan Antara Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran

Materi “Konsistensi Atau Kesesuaian Antardokumen Perencanaan dan Antara Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran” membahas pentingnya konsistensi atau kesesuaian antardokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran karena akan menentukan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun pada sisi yang lain, fenomena ketidakkonsistenan atau ketidaksesuaian antardokumen perencanaan hingga penganggaran masih ditemukan, sebagaimana hasil penelitian yang menjadi salah satu referensi pembahasan. Oleh karenanya, pentingnya konsistensi atau kesesuaian tersebut dibahas dari perspektif teoritik dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan teknik ceramah bervariasi, sesi pertama pelatihan diawali dengan penjelasan perspektik teoritik (lihat gambar 2 sebelah kiri) dengan mengacu pada pendapat Handoko (1995). Bahwa konsistensi antardokumen perencanaan menjadi salah satu kriteria penilaian efektivitas suatu rencana. Ada 6 kriteria penilaian

E-ISSN 2985-6442

efektivitas suatu rencana: (1) kegunaan, (2) ketepatan dan obyektivitas, (3) ruang lingkup, (4) efektivitas biaya, (5) akuntabilitas, serta (6) ketepatan waktu. Konsistensi antardokumen perencanaan masuk dalam kriteria kegunaan. bahwa rencana berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. Selain perspektif dari Handoko, dijelaskan juga hasil penelitian Karnitis dan Kucinskis (2009). Kedua peneliti tersebut menyatakan potensi kurangnya kontinuitas, kesinambungan, dan stabilitas strategi pembangunan karena pergantian pemerintah sebagai salah satu faktor resiko yang akan mempengaruhi pertumbuhan Latvia, yang mungkin juga akan berpengaruh pada pertumbuhan negara-negara lain yang mengembangkan dokumen-dokumen perencanaan Pembangunan, Kedua perspektif teoritik ini akan digunakan untuk mendiskusikan RAPBD Kabupaten Cilacap tahun 2024.

Sementara itu, dari perspektif peraturan perundangan dijelaskan: (1) hubungan antardokumen perencanaan berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023, RKPD 2024, dan KUA tahun 2024. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ditambah dengan perspektif teoritik di atas, dijelaskan hubungan antardokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, dan RAPBD.

Gambar 2. Pemberian Materi dan Pemantik Diskusi Hari Pertama dan Kedua

Selain mengajak peserta pelatihan untuk mengkaji hubungan antardokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen penyusunan APBD) di atas, juga disampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

E-ISSN 2985-6442

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun aspek substantif dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 yang disampaikan kepada para peserta pelatihan, adalah sebagai berikut.

1. Tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
2. Fokus Pembangunan
    a. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
    b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
    c. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
    d. penguatan daya saing usaha;
    e. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
    f. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
    g. percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
    h. pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

Tema rencana kerja dan fokus pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat di atas, akan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, sesuai dengan teknik situasi hipotesis (oleh karena bentuknya yang masih berupa RAPBD tahun 2024, bisa diasumsikan sebagai suatu bentuk “hipotesis” karena RAPBD tahun 2024 belum ditetapkan sebagai APBD tahun 2024) yang digunakan dalam pelatihan, peserta pelatihan diajak untuk mendiskusikan kesesuaian fokus pembangunan Permendagri No. 15 Tahun 2023 dengan RKPD 2024 dan KUA 2024. Untuk membantu proses diskusi, disiapkan tabel kerja sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Fokus Pembangunan Pada Permendagri No. 15 Tahun 2023 dengan RKPD 2024 dan KUA 2024 Kabupaten Cilacap

No.	Fokus Pembangunan Permendagri No. 15 Tahun 2023	Dokumen	
		RKPD 2024	KUA 2024
1	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		
2	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan		
3	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan		
4	Penguatan daya saing usaha		
5	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi		

E-ISSN 2985-6442

No.	Fokus Pembangunan Permendagri No. 15 Tahun 2023	Dokumen	
		RKPD 2024	KUA 2024
6	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas		
7	Penurunan stunting		
8	Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024		

Selain mendiskusikan tabel 1 di atas, peserta pelatihan juga diajak untuk mendiskusikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah. Mengutip dari Rahajeng (2016), melalui sinkronisasi tersebut akan menunjukkan: (1) Integrasi perencanaan dan penganggaran membuktikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan komitmen yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah, dan (2) Integrasi perencanaan dan penganggaran merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah bekerja untuk mencapai satu tujuan bersama.
Berdasarkan materi tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah, pada akhir materi pertama, peserta pelatihan diajak untuk mendiskusikan dan membandingkan PPAS dengan Raperda APBD tahun 2024 dan Raperbup Penjabaran APBD tahun 2024. Untuk membantu proses diskusi, disiapkan tabel kerja sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan PPAS Dengan Raperda APBD tahun 2024 dan Raperbup Penjabaran APBD tahun 2024

No.	Fokus Pembangunan Permendagri No. 15 Tahun 2023	Dokumen		
		PPAS	Raperda	Raperbup
1.	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			
Dst	Dst			

Peserta pelatihan cukup responsif terhadap ajakan mendiskusikan kesesuaian fokus pembangunan Permendagri No. 15 Tahun 2023 dengan RKPD 2024 dan KUA 2024 maupun PPAS Dengan Raperda APBD tahun 2024 dan Raperbup Penjabaran APBD tahun 2024. Gambar 3 di bawah ini merupakan contoh peserta pelatihan yang merespon dan mendiskusikan tentang kesesuaian dan perbandingan dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Cilacap

E-ISSN 2985-6442

Gambar 3. Diskusi Materi Dengan Peserta Pelatihan

Diskusi dengan peserta tidak hanya membahas tabel 1 dan 2 di atas. Sebelum membahas kedua tabel tersebut, peserta juga mengajak mendiskusikan tema-tema yang tengah hangat, namun tetap relevan dengan tema besar pelatihan, yakni APBD tahun 2024. Tema hangat yang dimaksud adalah kemiskinan ekstrem. Tema ini didiskusikan Bersama, mulai dari pengertian konseptual hingga kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan pada umumnya, serta relevansi kebijakan tersebut dengan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

D. SIMPULAN

Fungsi legislasi DPRD yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya adalah penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan dan penetapan Perda tersebut menghendaki konsistensi antardokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, fenomena ketidakkonsistenan atau ketidaksesuaian antardokumen perencanaan hingga penganggaran masih ditemukan. Oleh karenanya, dibahas materi “Konsistensi Atau Kesesuaian Antardokumen Perencanaan dan Antara Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran” dalam pelatihan yang dikemas dalam bentuk Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap tahun 2024. Pelatihan yang duperuntukkan anggota DPRD Kabupaten Cilacap menggunakan 2 metode pembelajaran yakni ceramah bervariasi dan teknik situasi hipotesis. Materi pelatihan dibahas dari perspektif teoritik dan peraturan perundangan yang relevan. Pada akhir paparan materi, diakhiri dengan mendiskusikan kesesuaian fokus pembangunan Permendagri No. 15 Tahun 2023 dengan RKPD 2024 dan KUA 2024 serta kesesuaian fokus pembangunan Permendagri No. 15 Tahun 2023 dengan RKPD 2024 dan KUA 2024. Proses diskusi dibantu dengan tabel kerja yang akan mempermudah peserta

pelatihan mendiskusikan tema kesesuaian aspek-aspek dalam perencanaan dan penganggaran daerah

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, T. H. (1995). *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Karim, R. Al. (2019). Impact of different training and development programs on employee performance in Bangladesh perspective. *International Journal of Entrepreneurial Research*, *2*(1), 8–14. https://readersinsight.net/index.php/IJER/article/view/497

Karnitis, E. & Kucinskis, M. (2009). "*Strategic Planning and Management of National Development Processes in Latvia"*. *Journal of Business Economics and Management.* 10(1): 3-13. Diunduh dari https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/1611-1699.2009.10.3-13

Kuruppu, C.L., Kavirathne, C.S.& Karunarathna, N. (2021). The Impact of Training on Employee Performance in a Selected Apparel Sector Organization in Sri Lanka. *Global Journal of Management and Business Research*, *21* (December), 13–20. https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/3330/3231

Mangkunegara, A.P. (2003). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Dharma.

Rahajeng, A. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sudjana S. (2005). *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production.